

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY AREA LAHENDONG

Wulan Charina Pijoh¹, Jerry Sonny Lintong², Lidya Maramis³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Manado

Email : Wcharina15@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Sales Accounting Information System (AIS) and its effect on the effectiveness of financial reporting at PT Pertamina Geothermal Energy, Lahendong Area. The main issues addressed include the uneven implementation of the SAP-based ERP system, particularly in operational units that still use manual recording, as well as weak internal controls. This research employs a descriptive qualitative approach with a case study method through observation, interviews, and document analysis. The results indicate that although the company has implemented an integrated AIS, several obstacles remain, such as delays in recording, non-automated validation processes, and a lack of task segregation, which increases the risk of errors and fraud. Financial statements are prepared periodically and reflect good performance, but they are not fully real-time due to manual processes and limited system integration. The study concludes that the effectiveness of the financial reporting system still has room for improvement. Therefore, it is recommended that the company accelerate comprehensive digitalization, strengthen internal controls, and enhance human resource competencies in managing digital systems to support accurate, efficient, and audit-ready financial reporting.

Keywords: Accounting Information System, ERP, Financial Reporting, Digitalization, Internal Control.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) penjualan terhadap efektivitas penyajian laporan keuangan pada PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum meratanya penerapan sistem ERP berbasis SAP, khususnya di unit operasional yang masih menggunakan pencatatan manual, serta lemahnya pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah menerapkan SIA yang terintegrasi, masih terdapat hambatan seperti keterlambatan pencatatan, proses validasi yang belum otomatis, serta kurangnya pemisahan tugas yang meningkatkan risiko kesalahan dan fraud. Laporan keuangan telah disusun secara berkala dan menunjukkan kinerja yang baik, namun tidak sepenuhnya real-time akibat proses manual dan kurangnya integrasi sistem. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas sistem pelaporan keuangan masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan mempercepat digitalisasi menyeluruh, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan kompetensi SDM dalam

pengelolaan sistem digital guna mendukung laporan keuangan yang akurat, efisien, dan siap audit.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, ERP, Laporan Keuangan, Digitalisasi, Pengendalian Internal.

PENDAHULUAN

BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara, terbagi menjadi Persero dan Perum, di mana PT Pertamina termasuk dalam bentuk Persero dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan layanan publik, serta memberdayakan pelaku ekonomi lemah. Laporan keuangan menjadi alat penting untuk menilai kinerja perusahaan dan harus disusun sesuai PSAK, termasuk amandemen terbaru PSAK 201. Sistem pengendalian internal berbasis COSO mencakup lima komponen penting untuk menjamin efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan hukum.

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha Pertamina Power Indonesia, memainkan peran strategis dalam pengembangan energi panas bumi dengan kinerja keuangan yang positif, terutama di Area Lahendong. Meski begitu, PGE masih menghadapi kendala dalam sistem informasi akuntansi seperti pencatatan yang belum *real-time*, belum terdigitalisasi dan kurangnya pemisahan tugas. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan terhadap Efektivitas Penyajian Laporan Keuangan pada PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong."

- Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu:
Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan pada PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong?.
- Tujuan penelitian untuk:
Mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan pada PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong.

LANDASAN TEORI

Sistem Informasi Akuntansi

Diambil dari buku Sistem Akuntansi Entitas (Jerry Sonny Lintong, 2020) Mengatakan bahwa pengolahan dilakukan terhadap data menjadi informasi, dimana data menunjuk pada data keuangan yang direkam dalam bukti transaksi sebagai input dalam proses akuntansi, sedangkan informasi berupa laporan keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi tersebut atau outputnya.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan, menjamin kepatuhan terhadap regulasi standar akuntansi yang berlaku, menyediakan sarana untuk pengendalian internal guna mencegah kecurangan atau kesalahan dalam pelaporan keuangan. Jadi secara keseluruhan, Sistem Informasi akuntansi (SIA) memainkan peran penting dalam menjaga integritas data keuangan, mendukung proses pengelolaan keuangan yang efektif dalam suatu organisasi.

Laporan Keuangan

Menurut (Davidson, 2020) laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi dan keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya pada bidang keuangan.

Laporan keuangan adalah suatu catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi, untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan.

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan

Sistem Informasi Akuntansi penjualan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sumber daya manusia, alat, metode, dan prosedur yang saling terkoordinasi untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data penjualan menjadi informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, guna mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dalam aktivitas penjualan perusahaan.

Sistem penjualan dibagi menjadi dua sistem, yaitu:

- Sistem penjualan tunai
Pada sistem ini, bila pembeli sudah memilih barang yang akan dibeli, pembeli diharuskan membayar sebagian kas. Maka tidak perlu ada prosedur pengiriman barang pada toko penjual. Informasi yang biasa dibutuhkan dalam sistem penjualan tunai, yaitu jumlah penerimaan kas dari penjualan tunai setiap hari, jumlah kas yang disetorkan ke bank setiap hari.
- Sistem penjualan kredit
Pada umumnya, sistem penjualan kredit terdiri dari prosedur pesanan penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur pembuatan faktur, prosedur akuntansi penjualan kredit. Prosedur pesanan penjualan informasi yang dibutuhkan meliputi pesanan yang belum dapat dipenuhi serta dalam kesanggupan mengirim barang di waktu tertentu.

1. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan

- Meningkatkan Efisiensi Operasional
Sistem mempercepat pencatatan transaksi penjualan secara otomatis, menghemat waktu, tenaga, dan mengurangi kesalahan manusia.
- Meningkatkan Akurasi Data
Menjamin ketepatan data penjualan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan meminimalkan kesalahan.
- Memudahkan Pemantauan dan Pengendalian Piutang
Membantu perusahaan memantau jatuh tempo piutang dari penjualan kredit dan menindaklanjuti keterlambatan pembayaran.
- Menghasilkan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Akurat
Menyediakan laporan penjualan seperti laba rugi dan neraca secara tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Meningkatkan Pelayanan Pelanggan
Pencatatan yang sistematis memudahkan perusahaan memberi informasi akurat terkait pesanan dan pengiriman.
- Mengoptimalkan Pengelolaan Persediaan
Terintegrasi dengan sistem persediaan, memungkinkan pemantauan stok secara otomatis untuk mencegah kekurangan atau kelebihan barang.

2. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi penjualan tercatat secara akurat, dapat memberikan laporan keuangan dengan tepat waktu, memantau piutang, mengelola persediaan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Adanya sistem ini maka, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, sampai kecurangan dalam transaksi penjualan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena dan situasi secara mendalam. Fokus utamanya adalah memahami pengalaman, pandangan, dan persepsi subjek melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan secara lapangan (*field research*) agar data yang diperoleh lebih relevan dan mencerminkan realitas, khususnya dalam memahami penyajian sistem informasi akuntansi pada proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan studi kasus untuk menilai efektivitas pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong, yang berlokasi di Jl. Raya Tomohon No. 420, Tomohon Selatan, Sulawesi Utara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan menguji secara faktual bagaimana proses pengelolaan transaksi penjualan berjalan untuk memastikan efektivitasnya. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme sistem informasi akuntansi dalam siklus penjualan, di mana sistem yang baik harus mampu menyediakan informasi yang akurat dan pencatatan yang tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, analisis, dan penarikan kesimpulan, mengacu pada pendapat, yang menyatakan bahwa proses analisis dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data dianggap jenuh. Teknik analisis kualitatif deskriptif ini memberikan gambaran mendalam terkait kesesuaian siklus penjualan dalam sistem informasi akuntansi, serta mendukung keberlanjutan perusahaan, efisiensi laporan keuangan, percepatan proses penjualan, dan pertumbuhan pendapatan.

HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong
 - a. Prosedur Pencatatan Penjualan

Prosedur pencatatan penjualan dimulai ketika terjadi permintaan atas pasokan energi listrik yang dihasilkan dari uap panas bumi (geothermal). Energi tersebut kemudian disalurkan kepada pembeli utama, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

 - Penjualan energy listrik kepada PLN, dilakukan berdasarkan skema kontrak jangka panjang yang di sebut dengan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) atau lebih dikenal dengan Power Purchase Agreement (PPA). Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara terperinci, termasuk volume energi yang disalurkan, harga jual, serta ketentuan pembayaran dan penagihan. Pembuatan dokumen dibuat oleh bagian admin.
 - Selanjutnya, dilakukan proses negosiasi kontrak Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan pihak PLN sebelum dimulainya Commercial Operation Date (COD). Proses negosiasi ini mencakup sejumlah aspek penting, antara lain penetapan harga jual listrik (umumnya dinyatakan dalam satuan kWh), volume dan kapasitas listrik yang akan dipasok, jadwal penyaluran energi, waktu operasional, durasi kontrak, serta ketentuan terkait force majeure dan penalti yang mungkin dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Perusahaan menjalankan kegiatan penjualan energi berdasarkan kontrak jangka panjang, dengan periode pelaksanaan berkisar antara 20 hingga 30 tahun.
 - Setelah proses negosiasi mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Penandatanganan perjanjian tersebut kemudian dilegalisasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (SDM) atau lembaga yang berwenang dalam

- pengaturan ketenagalistrikan sebagai bentuk pengesahan resmi terhadap perjanjian yang telah disepakati ketenagalistrikan.
- b. Prosedur Pencatatan Transaksi Penjualan
 - Transaksi dimulai pada saat energi listrik yang dihasilkan oleh turbin disalurkan ke jaringan milik PLN melalui sistem transmisi yang terinterkoneksi. Pengukuran energi dilakukan oleh perusahaan melalui metering unit bersama yang digunakan secara resmi oleh kedua belah pihak. Proses pencatatan dan pelaporan atas jumlah energi yang disalurkan menjadi tanggung jawab bagian unit produksi, yang bertugas memastikan akurasi data volume energi dalam setiap periode transaksi.
 - Laporan hasil pengukuran energi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST), yang disusun oleh bagian administrasi. Dokumen ini menjadi bukti formal atas penyerahan energi listrik kepada pihak pelanggan.
 - Setelah dokumen dan data pengiriman disetujui oleh kedua belah pihak, bagian administrasi menyusun invoice berdasarkan jumlah energi listrik dalam satuan kWh yang telah disalurkan. Pembayaran oleh pihak PLN dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, yang pada umumnya memiliki jangka waktu pembayaran selama 30 hari kerja.
 - c. Prosedur Pengakuan Pendapatan

Pendapatan perusahaan diakui setelah terjadinya penyaluran energi dan penerbitan tagihan kepada pelanggan, sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang "Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Dalam konteks PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), pengalihan pengendalian terjadi ketika energi panas bumi disalurkan dan diterima oleh PLN berdasarkan kontrak jual beli tenaga listrik yang telah disepakati. Seluruh transaksi penjualan di perusahaan dicatat menggunakan basis akrual (*accrual basis*)
 - d. Prosedur Penerimaan Kas

Setelah invoice dikirimkan kepada PLN, bagian treasury dan keuangan bertanggung jawab untuk memantau penerimaan pembayaran yang masuk ke dalam rekening bank perusahaan. Pada saat pembayaran diterima, bagian akuntansi akan melakukan pencatatan penerimaan kas dan melakukan rekonsiliasi dengan invoice yang telah diterbitkan sebelumnya.

Proses ini telah terintegrasi dalam sistem SAP (*Systems, Applications, and Products in Data Processing*) sebagai bagian dari sistem informasi keuangan perusahaan. Namun demikian, verifikasi atas pembayaran masih dilakukan secara manual, terutama dalam hal memastikan kesesuaian antara jumlah pembayaran dan waktu penerimaan dengan data pada invoice, guna menjamin akurasi dan keandalan laporan keuangan.
 - e. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun oleh bagian akuntansi dan keuangan pusat berdasarkan data yang dikumpulkan dari unit operasional dan data yang tercatat dalam sistem SAP. Laporan disusun secara periodik: bulanan, triwulanan, dan tahunan, mencakup laporan laba rugi, dan neraca.

 - Laporan Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang mencerminkan hasil dari proses pencatatan akuntansi atas kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode tertentu. Laporan ini disusun untuk mengevaluasi apakah aktivitas penjualan dan operasional perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian dalam periode tersebut.
 - Laporan posisi keuangan (neraca) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu

- tertentu, dengan menampilkan keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan serta kewajiban dan modal yang digunakan untuk mendanainya.
2. Evaluasi efektivitas penyajian laporan keuangan pada PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong.
 1. Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan
Ketepatan waktu merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaporan keuangan, di mana informasi keuangan seharusnya disajikan dalam periode yang memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan di tingkat kantor pusat telah menjalankan pelaporan keuangan sesuai jadwal yang ditentukan oleh pemegang saham, induk perusahaan, dan otoritas regulasi. Namun, berbeda dengan kantor pusat, unit operasional, seperti yang ada di Area Lahendong, masih mengalami kendala dalam memenuhi target waktu pelaporan. Keterlambatan tersebut terutama disebabkan oleh proses pengumpulan dan pencatatan data transaksi yang masih dilakukan secara semi-manual, yakni dengan pencatatan manual terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan input data ke dalam sistem pusat. Proses ini memakan waktu dan sangat tergantung pada kecepatan koordinasi antarbagian. Selain itu, proses validasi dan verifikasi data juga memerlukan waktu tambahan karena dilakukan secara terpisah dan tidak melalui sistem otomatis. Akibatnya, pelaporan keuangan tidak dapat dilakukan secara cepat dan real-time, sehingga menghambat kecepatan manajemen dalam merespons perubahan kondisi keuangan maupun operasional perusahaan.
 2. Tingkat Digitalisasi Sistem Pelaporan Keuangan
Perusahaan telah menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) dengan modul SAP untuk mendukung pelaporan dan pengelolaan keuangan. Namun, implementasi sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi di seluruh proses bisnis dan seluruh unit kerja. Dalam praktiknya, masih terdapat banyak aktivitas pelaporan yang bergantung pada dokumen fisik, seperti invoice (tagihan), BAST (berita acara serah terima), dan laporan realisasi produksi atau penjualan energi. Dokumen-dokumen tersebut dicetak dan didistribusikan secara manual, kemudian diinput ulang ke dalam sistem oleh bagian keuangan. Selain itu, proses otorisasi, validasi, dan pelacakan status dokumen sering kali dilakukan melalui email atau komunikasi informal lainnya, bukan melalui alur kerja otomatis yang tersedia dalam sistem ERP. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh, baik dari sisi perangkat, integrasi sistem, maupun kompetensi SDM. Akibatnya, manfaat sistem ERP, seperti kecepatan akses data, akurasi, dan efisiensi pelaporan, belum dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh bagian perusahaan.
 3. Kurangnya Pemisahan Tugas
Salah satu prinsip utama dalam sistem pengendalian internal yang baik adalah adanya pemisahan tugas secara tegas antara pihak yang menjalankan, mencatat, dan mengawasi transaksi. Penelitian ini menemukan bahwa di beberapa unit operasional, masih terdapat personel yang menjalankan lebih dari satu fungsi dalam siklus pelaporan keuangan. Misalnya, seorang pegawai yang melakukan pencatatan transaksi juga bertugas dalam penyusunan laporan serta pengarsipan dokumen. Kondisi ini sangat rentan terhadap kesalahan, baik yang bersifat tidak disengaja (*human error*) maupun yang disengaja (*fraud*), karena tidak terdapat mekanisme pengawasan silang (*internal check*) yang memadai. Selain itu, kesulitan dalam melakukan audit internal dan eksternal juga meningkat karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan proses. Pemisahan tugas yang tidak optimal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di tingkat operasional

belum berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, pengendalian internal yang kuat merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan valid, andal, dan bebas dari manipulasi. Sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital juga menjadi faktor penunjang keberhasilan transformasi pelaporan keuangan yang akurat, real-time, dan siap audit.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan langkah strategis dengan mengadopsi sistem berbasis Enterprise Resource Planning (ERP), yaitu SAP, untuk mengelola proses keuangan dan penjualan. Sistem ini secara umum telah mengakomodasi prosedur penting seperti Purchase Instruction (PI) dan proses pencatatan penjualan, namun pelaksanaannya masih belum merata di seluruh unit operasional. Ketidaktepatan dalam integrasi ini menyebabkan beberapa proses masih dilakukan secara manual, yang berdampak pada keterlambatan pencatatan, risiko kesalahan input, dan menurunnya efisiensi sistem. SIA tidak semata bergantung pada teknologi, namun sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM). Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem sangat bergantung pada pemahaman, keterlibatan, dan keterampilan karyawan dalam mengoperasikan sistem SAP. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi digital perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM agar sistem dapat diimplementasikan secara efektif. Dari sisi prosedural, proses penjualan energi panas bumi kepada PLN telah berjalan sesuai regulasi dan kontrak jangka panjang melalui skema Power Purchase Agreement (PPA). Dokumen PPA mencantumkan elemen-elemen penting seperti kapasitas kontrak, harga tetap per kWh, skema pembayaran berbasis invoice dan BAST, serta klausul eskalasi tarif dan penyelesaian sengketa. Proses negosiasi hingga penandatanganan kontrak melibatkan admin internal dan memerlukan legalisasi dari Kementerian ESDM, menandakan tata kelola penjualan dilakukan secara profesional dan sesuai standar industri energi. Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan pengukuran energi aktual melalui unit metering bersama yang dimiliki oleh PGE dan PLN. Hasil pengukuran ini dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST), yang kemudian menjadi dasar penyusunan invoice penjualan. Invoice menjadi dokumen formal yang tidak hanya mendasari proses penagihan, tetapi juga digunakan untuk pengakuan pendapatan dan pencatatan piutang dalam sistem akuntansi perusahaan. Pengakuan pendapatan telah mengacu pada PSAK 72, yaitu pendapatan dicatat saat pengendalian jasa telah berpindah ke pelanggan. Dalam konteks PGE, hal ini terjadi saat energi telah disalurkan dan diterima oleh PLN. Seluruh proses pencatatan menggunakan basis akrual, artinya pendapatan tetap diakui pada saat jasa diberikan meskipun pembayaran belum diterima. Dapat memperlihatkan kesesuaian dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Sementara itu, proses penerimaan kas, meskipun telah terhubung dengan sistem SAP, masih mengandalkan verifikasi manual untuk memastikan kesesuaian jumlah dan waktu pembayaran dengan data invoice. Menunjukkan bahwa meskipun sistem ERP telah diterapkan, proses kontrol internal tetap dilakukan secara konvensional untuk menjaga akurasi pelaporan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala oleh kantor pusat berdasarkan data dari unit operasional dan SAP. Laporan laba rugi dan neraca menunjukkan bahwa perusahaan mencatat pendapatan signifikan dari aktivitas penjualan energi, dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk mencapai USD 31,373 ribu pada tahun 2025. Posisi keuangan juga menunjukkan peningkatan aset dan stabilitas ekuitas. Neraca pada perusahaan dapat menunjukkan apakah perusahaan dalam kondisi sehat secara finansial, serta mencerminkan

keseimbangan antara aset atau semua yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, aset tetap. Serta liabilitas yang merupakan kewajiban atau utang perusahaan. Ekuitas merupakan hak pemilik atau aset yang dimiliki setelah dikurangi dengan liabilitas. Dimana dalam artiannya bahwa:

Aset = Kewajiban + Ekuitas.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi penjualan di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong telah menunjukkan struktur yang sistematis dan berbasis regulasi. Meski perusahaan telah mengadopsi sistem ERP (SAP), implementasinya belum menyeluruh, terutama di tingkat unit operasional. Ketergantungan pada proses manual masih menjadi kendala utama, terutama dalam hal pencatatan awal, verifikasi pembayaran, dan integrasi dokumen pendukung seperti BAST dan invoice. Kinerja sistem juga sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, terutama dalam mengelola input data dan menjalankan fungsi akuntansi secara akurat. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan transformasi digital yang menyeluruh serta memastikan adanya penguatan kompetensi SDM, pelatihan internal, dan standarisasi prosedur kerja di semua unit. Integrasi penuh sistem informasi, penggunaan otomatisasi, dan penguatan pengendalian internal akan meningkatkan kecepatan pelaporan, akurasi data, auditabilitas transaksi, serta transparansi dalam proses pencatatan penjualan. Hal ini akan sangat mendukung pengambilan keputusan manajerial yang berbasis data dan memastikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

2. Evaluasi Efektivitas Penyajian Laporan Keuangan

Evaluasi efektivitas penyajian laporan keuangan bertujuan untuk menilai sejauh mana laporan keuangan yang dihasilkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar pelaporan, yakni ketepatan waktu, keandalan, akurasi, dan auditabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa indikator utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, yaitu ketepatan waktu, tingkat digitalisasi sistem, dan sistem pengendalian internal melalui pemisahan tugas.

1. Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan

Ketepatan waktu merupakan elemen kunci dalam pelaporan keuangan yang relevan. Laporan yang disajikan secara tepat waktu akan mendukung pengambilan keputusan yang cepat, responsif, dan berbasis data aktual. Dalam praktiknya, kantor pusat PT Pertamina Geothermal Energy telah berhasil menjalankan proses pelaporan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh induk perusahaan maupun regulator. Namun demikian, unit operasional di Area Lahendong masih menghadapi hambatan dalam mencapai ketepatan waktu pelaporan. Hambatan utama terletak pada proses pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara semi-manual. Data transaksi terlebih dahulu dicatat secara manual, kemudian baru dimasukkan ke dalam sistem pusat. Proses ini tidak hanya memperlambat alur pelaporan, tetapi juga membuka peluang terjadinya kesalahan input serta keterlambatan dalam verifikasi. Selain itu, proses validasi dan verifikasi data keuangan masih dilakukan secara terpisah dari sistem utama, yang menyebabkan tambahan waktu dalam siklus pelaporan. Belum tersedianya mekanisme otomatisasi menyebabkan keterbatasan dalam pelaporan yang bersifat real-time. Akibatnya, pihak manajemen mengalami keterlambatan dalam mendapatkan informasi keuangan terkini untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional.

2. Tingkat Digitalisasi Sistem Pelaporan Keuangan

PT Pertamina Geothermal Energy sebenarnya telah mengadopsi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis SAP untuk mendukung proses pelaporan keuangan. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dan menyediakan data secara otomatis dan real-time. Akan tetapi, hasil penelitian

menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi masih belum merata di seluruh lini operasional, termasuk Area Lahendong. Masih banyak aktivitas pelaporan yang bergantung pada dokumen fisik, seperti invoice, berita acara serah terima (BAST), dan laporan realisasi produksi. Dokumen-dokumen ini dicetak, ditandatangani secara fisik, lalu dikirim secara manual atau melalui email sebelum akhirnya diinput ulang ke dalam sistem. Penggunaan sistem SAP belum sepenuhnya dimaksimalkan, terutama dalam hal otomatisasi alur kerja, validasi dokumen, serta pelacakan status pelaporan. Otorisasi dan koordinasi antarbagian pun masih dilakukan melalui komunikasi informal, seperti email atau pesan singkat, yang meningkatkan risiko miskomunikasi dan keterlambatan. Hal ini menandakan bahwa digitalisasi belum menyentuh aspek proses dan budaya kerja secara menyeluruh. Selain itu, kompetensi SDM dalam mengoperasikan sistem digital masih perlu ditingkatkan agar dapat mengoptimalkan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem ERP. Kondisi ini berdampak pada kurangnya efisiensi, akurasi, dan kecepatan pelaporan, yang seharusnya menjadi keunggulan utama dari sistem informasi akuntansi digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan digitalisasi menyeluruh, termasuk dalam aspek integrasi sistem antarunit, pelatihan SDM, dan otomatisasi proses pelaporan keuangan.

3. Kurangnya Pemisahan Tugas dalam Proses Pelaporan

Prinsip pemisahan tugas atau segregation of duties merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa unit operasional PGE Area Lahendong, masih ditemukan tumpang tindih fungsi dalam proses pelaporan keuangan. Beberapa personel tercatat menjalankan lebih dari satu peran, seperti mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan sekaligus mengarsipkan dokumen. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan beban kerja individu, tetapi juga menciptakan kerentanan terhadap kesalahan administratif maupun potensi penyalahgunaan wewenang (*fraud*). Tanpa adanya pengawasan silang (*internal check*), proses pelaporan kehilangan elemen kontrol yang esensial untuk menjamin akurasi dan integritas data. Selain itu, ketidakjelasan tanggung jawab antarbagian membuat proses audit, baik internal maupun eksternal, menjadi lebih sulit dilakukan. Ketika tidak ada pemisahan yang jelas antara pihak yang memproses, mencatat, dan mengawasi transaksi, maka perusahaan tidak memiliki struktur kontrol yang cukup kuat untuk mendeteksi dan mencegah ketidaksesuaian dalam pelaporan. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, khususnya pada unit operasional, perlu diperkuat melalui pembagian tugas yang lebih tegas dan terstruktur, disertai dokumentasi peran dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini penting agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga valid, transparan, dan siap untuk diaudit kapan pun diperlukan. Secara keseluruhan, efektivitas pelaporan keuangan di Area Lahendong belum mencapai kondisi optimal akibat keterlambatan pelaporan, tingkat digitalisasi yang rendah, dan lemahnya sistem pengendalian internal. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menyeluruh yang meliputi:

- Digitalisasi penuh proses pelaporan dan dokumen pendukungnya.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam pemanfaatan sistem ERP.
- Penataan ulang struktur kerja dan pemisahan tugas, guna memperkuat kontrol internal dan meminimalisasi risiko kesalahan serta kecurangan.

Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih efisien, terpercaya, responsif, dan siap audit, serta mendukung perwujudan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong telah menerapkan sistem ERP untuk mendukung proses keuangan dan penjualan, namun pelaksanaannya belum merata di seluruh unit. Beberapa proses masih dilakukan secara manual, yang menimbulkan keterlambatan dan potensi kesalahan pencatatan. Proses penjualan energi ke PLN telah dilakukan melalui kontrak PPA yang sesuai regulasi, dengan pencatatan transaksi berdasarkan BAST dan pengakuan pendapatan mengacu pada PSAK 72 dan basis akrual. Keberhasilan sistem ERP sangat bergantung pada pemahaman dan kemampuan teknis SDM. Minimnya pelatihan dan pemahaman sistem menyebabkan efektivitas penerapan sistem belum optimal. Verifikasi pembayaran dan pelacakan dokumen masih dilakukan secara manual, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum terintegrasi dengan baik dalam platform digital. Laporan keuangan disusun oleh kantor pusat berdasarkan data dari unit operasional, namun keterlambatan pelaporan di area terjadi akibat proses input manual dan belum optimalnya integrasi data secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

Davidson. (2020). Pengertian Laporan Keuangan. *eprints.perbanas.ac.id*.

Jerry Sonny Lintong, J. O. (2020). *Sistem Akuntansi Entitas*.